



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK
PENGUATAN TATALAKSANA**

TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 2018

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK

PENGUATAN TATALAKSANA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia sangat diperlukan karena pertarungan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21 semakin besar. Dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terdapat ribuan proses yang tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Selain itu perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru yang menyesuaikan dengan kondisi global.

Pada tahun 2010 Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, salah satu agenda area perubahan yang dilakukan adalah di bidang Tatalaksana.

Tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Kementerian/Lembaga.

Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (*business process*) perlu dilaksanakan apabila :

- a. Terjadi perubahan arah strategis Kementerian/Lembaga (visi, misi dan sasaran strategis) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi/unit kerja.
- b. Adanya keinginan/dorongan dari dalam Kementerian/Lembaga atau pun dorongan dari publik/masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan public secara signifikan.

Sedangkan muara dari penataan tatalaksana yaitu, antara lain:

- a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
- b. Perbaikan struktur organisasi; dan
- c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP), maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab terhadap keberhasilan program dan kegiatan yang mendorong pencapaian target agenda nasional di bidang PMK, di antaranya pendidikan, kesehatan, pemuda, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan masyarakat, serta kependudukan dan keluarga berencana. Setiap agenda pembangunan nasional di bidang PMK mempunyai target-target makro yang akan dicapai melalui program dan kegiatan kementerian dan lembaga yang terkait dengan bidang PMK. Target-target dimaksud akan dijadikan pedoman oleh Kemenko PMK, agar proses KSP secara sinergi dan terus menerus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap pencapaian target dimaksud.

Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dalam lima tahun ke depan pemerintahan sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja. Sehingga pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah sampai pada tahapan pemerintahan yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sedangkan tujuan dari area perubahan tata laksana yaitu membuat proses lebih efektif, efisien dan adaptif dimana sasaran perbaikan Tatalaksana antara lain :

- a. Penurunan biaya.
- b. Peningkatan kualitas output.
- c. Peningkatan kualitas layanan.
- d. Peningkatan kecepatan pelayanan.

1.3. Kondisi Saat Ini

Tim RB Kemenko PMK Area Perubahan Penguatan Tatalaksana telah menyelesaikan beberapa hal yaitu :

- Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- Reviu SOP Kemenko PMK;
- Roadmap dan hasil assesment penerapan e-Gov di Kemenko PMK (grand design);

- Penyempurnaan SIPP, SIPK, Dashboard kinerja Eselon II Kemenko PMK;
- Penyusunan Draft Kepmenko PMK tentang PPID dimana sebelumnya sudah ada tapi berdasarkan Kepmenko Kesra No.17/2011 tentang Organisasi PPID dan Permenko Kesra No.04/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi, serta;
- Reviu terkait dokumen keterbukaan informasi publik.

1.4. Permasalahan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, beberapa hal yang ditemukan dalam pelaksanaan RB di Kemenko PMK yaitu:

- Belum seluruh unit kerja memiliki peta proses bisnis.
- Penyusunan SOP belum sepenuhnya didasarkan proses bisnis unit kerja.
- Kebijakan pimpinan tentang Keterbukaan Informasi Publik belum diperbaharui.
- *e-Government* belum seluruhnya terintegrasi

II. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dengan memperhatikan hasil review tim RB Kemenko PMK serta memperhatikan hasil evaluasi tim Kemenpan RBT, Tim RB Kemenko PMK Area Perubahan Penguatan Tatalaksana telah menyelesaikan beberapa hal yaitu :

- ✓ Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- ✓ Reviu SOP Kemenko PMK;
- ✓ Roadmap dan hasil assesment penerapan e-Gov di Kemenko PMK (grand design);
- ✓ Penyempurnaan SIPP, SIPK, Dashboard kinerja Eselon II Kemenko PMK;
- ✓ Penyusunan Draft Kepmenko PMK tentang PPID dimana sebelumnya sudah ada tapi berdasarkan Kepmenko Kesra No.17/2011 tentang Organisasi PPID dan Permenko Kesra No.04/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi, serta;
- ✓ Pembuatan ruang PPID;
- ✓ Reviu terkait dokumen keterbukaan informasi publik.

III. PENUTUP

Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK telah dilaksanakan sesuai hasil review Tim RB Kemenko PMK dan hasil evaluasi Tim Kemenpan RB. Agar perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan diketahui dan dimengerti oleh seluruh pegawai, dilakukan sosialisasi dan pelatihan.

Dalam area perubahan penguatan tatalaksana, telah banyak dilakukan perubahan-perubahan diantaranya review terhadap proses bisnis dan SOP serta penyempurnaan SIPP, SIPK,

Dashboard kinerja Eselon II Kemenko PMK. Kami juga mendorong agar kebijakan-kebijakan di area tatalaksana segera ditetapkan oleh pimpinan.

LAMPIRAN:

1. Draf Permenko Proses Bisnis dan SOP;
2. Proses Bisnis Kemenko PMK;
3. SOP unit kerja;
4. Petunjuk pelaksanaan penyusunan SOP;
5. Pedoman penyelenggaraan persidangan;
6. Undangan dan notulen rapat penyusunan SOP;
7. Undangan dan notulen rapat inventarisasi SOP;
8. Buku *Grand Design* STI;
9. Panduan aplikasi monitoring kegiatan Kemenko PMK;
10. *Screen capture* aplikasi e-gov untuk internal (website, SIPK, SIPP, aplikasi pemesanan ruang rapat, aplikasi *dashboard* kegiatan eselon 2, aplikasi KontakPMK);
11. *Screen capture* sms center dan aplikasi kontak kami;
12. *Screen capture* aplikasi forum komunikasi data pilar sosial budaya ASEAN;
13. Draf Permenko PPID Kemenko PMK;
14. Notulen rapat PPID;
15. Permenko Kesra tentang PPID;
16. Foto ruang PPID;
17. *Screen capture* informasi publik di website;
18. Undangan dan notulen monev PPID.